

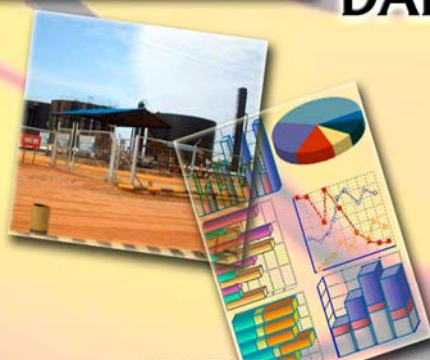


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

LAPORAN AKHIR



KAJIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI DAERAH



KABUPATEN BANDUNG

**DES
NOON**

Disampaikan oleh



PT. Multi Area Conindo

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab 1	
PENDAHULUAN	
1.1. Tujuan dan Target	3
1.2. Keunggulan Berbasis Kompetensi	4
Bab 2	
PROFIL KABUPATEN BANDUNG	
2.1. Kondisi Umum dan Perkembangan	6
2.2. Kondisi Demografi	8
Bab 3	
PROFIL IKM DAN KABUPATEN BANDUNG	9
Bab 4	
PENENTUAN & ANALISIS PRODUK UNGGULAN PRIORITAS (PUP)	9
Bab 5	
IDENTIFIKASI DAFTAR KOMPETENSI & KOMPETENSI INTI TPT KABUPATEN BANDUNG	11
Bab 6	
ANALISIS RANTAI NILAI, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI INTI	13
Bab 7	
ANALISIS RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN INDUSTRI TPT KABUPATEN BANDUNG	15
Bab 8	
PENUTUP	
8.1. Kesimpulan	17
8.2. Saran	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Output Kegiatan	3
Tabel 2.	Kesesuaian Ruang Lingkup Kegiatan dengan Tujuan dan Output Kegiatan	4
Tabel 3.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2006	6
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 - 2006	7
Tabel 5.	Profil IKM Kabupaten Bandung	9
Tabel 6.	Peringkat Produk Unggulan untuk Penentuan PUP	10
Tabel 7.	Daftar Kompetensi Tekstil dan Produk Tekstil Kabupaten Bandung	11
Tabel 8.	Sentra Produksi IKM-TPT Kabupaten Bandung	12
Tabel 9.	Rencana Tindak Pengembangan Industri TPT di Kabupaten Bandung	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diagram Alir Produk TPT	14
Gambar 2.	Diagram Alir Operasi Industri TPT	14

1 PENDAHULUAN

Industri nasional pada saat ini menghadapi tantangan baru dengan kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar internasional. Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri.

Kebijakan pembangunan industri jangka menengah saat ini (2004-2009) diarahkan pada pengembangan dan penumbuhan kluster-kluster industri, yang sementara ini berjumlah sepuluh kelompok industri, yaitu: (i) industri makanan dan minuman, (ii) industri pengolahan hasil laut, (iii) industri tekstil dan produk tekstil, (iv) industri alas kaki, (v) industri kelapa sawit, (vi) industri barang kayu (termasuk rotan), (vii) industri karet dan barang karet, (viii) industri pulp dan kertas, (ix) industri mesin listrik dan peralatannya, (x) serta industri petrokimia. Dalam kebijakan pembangunan industri, pengembangan sepuluh kluster industri ini dilakukan secara komprehensif dan integratif, yang didukung secara simultan dengan pengembangan industri terkait (*related industries*) dan industri penunjang (*supporting industries*). Dalam pelaksanaannya, pembangunan industri dimaksud seharusnya juga dilakukan dengan sinergi dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lain seperti pertanian dan jasa. Dukungan kelembagaan juga harus bersinergi dengan dengan koordinasi kelembagaan terkait seperti BKPM.

Sebagai bagian kebijakan industri, baik untuk perencanaan maupun pelaksanaannya, telah dibentuk kelompok kerja teknis (*working group*) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Kelompok kerja dimaksud beranggotakan semua stakeholders utama yang terlibat baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga pendukung untuk penelitian dan pendidikan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pembangunan industri, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri dilaksanakan dengan melakukan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional atau pusat dan perencanaan di tingkat daerah. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* pembangunan industri direncanakan dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Hal ini biasa dikenal dengan pembangunan berdasarkan disain (*by design*) nasional. Pendekatan *bottom up* dilakukan dengan penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah. Penggunaan kompetensi inti sebagai unggulan daerah ini dimaksudkan agar daerah memiliki daya saing dan meningkatkan daya saingnya.

Praktek perencanaan dengan dua pendekatan ini tercermin dari pelaksanaan rencana

pembangunan industri. Berdasarkan disain nasional, kebijakan industri secara nasional dilakukan dengan menentukan industri prioritas, yaitu dikenalkannya 32 industri prioritas dengan pendekatan kluster. Kemudian, secara *bottom up*, pemerintah telah secara aktif melakukan sosialisasi dan mengajak daerah berpartisipasi dalam pembangunan kompetensi inti pada setiap daerah prioritas. Penggunaan kompetensi inti dalam pembangunan industri daerah cukup relevan untuk tujuan peningkatan daya saing daerah dan akhirnya juga peningkatan daya saing nasional. Hal ini dapat terjadi mengingat bahwa pendekatan kompetensi inti berusaha mengeksplorasi kelebihan dan keunggulan daerah secara unik. Kompetensi inti didefinisikan sebagai kumpulan ketrampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi dapat menyediakan manfaat tersendiri secara unik kepada pelanggannya. Hal ini diterjemahkan dalam pembangunan industri daerah dengan mencoba melakukan eksploitasi sumberdaya dan kemampuan organisasi secara unik. Keunikan ini merupakan nilai tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain, dan oleh karena itu akan menjadi keuntungan bagi daerah yang memilikinya. Penerapan kompetensi inti secara nasional dapat diterjemahkan dengan memperkenalkan satu produk unik pada setiap daerah yang berbeda. Hal ini dilakukan agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti yang bersifat unik.

Sesuai dengan sumber dan perkembangan konsep kompetensi inti, maka dalam usaha membangun kompetensi inti (baik berupa produk, layanan atau komoditi) seharusnya memperhatikan kriteria-kriteria yang relevan dengan kebutuhan peningkatan daya saing, yaitu keunikan (dan sulit ditiru), kemampuan memberi manfaat lebih, atau kemampuan memberi keuntungan dengan korbanan yang lebih efisien. Pada konteks daerah, pemilihan kompetensi inti seharusnya mempertimbangkan kondisi daerah dengan tetap memperhatikan kriteria persaingan seperti: adanya nilai tambah yang tinggi, adanya sifat yang unik, adanya keterkaitan dan peluang untuk bersaing di pasar luar daerah (bahkan internasional). Dengan kata lain, pemilihan dan penentuan kompetensi inti seharusnya memberi dampak yang besar dalam memberi stimulus perekonomian daerah. Yang lebih penting lagi hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah.

Sampai saat ini pembangunan industri masih menghadapi banyak masalah dan kendala. Masalah penurunan daya saing juga tidak terlepas dari belum diterapkannya pembangunan industri berbasis kompetensi secara penuh. Meskipun hal ini hanya salah satu dari beberapa faktor yang mungkin memberi sumbangan terhadap penurunan daya saing, tetapi kompetensi inti sebagai faktor dalam keunggulan bersaing mempunyai nilai tersendiri untuk diperhatikan. Permasalahan tersebut secara singkat dapat dijelaskan berikut.

Pengembangan kompetensi inti masih banyak menghadapi permasalahan, dan dalam banyak hal konsep kompetensi inti belum diterapkan secara benar dan terintegrasi dalam perencanaan perekonomian daerah. Dalam praktek, konsep kompetensi inti juga masih dipahami secara parsial dengan tanpa mempertimbangkan karakteristik dan indikator-indikator tentang kompetensi inti. Pemahaman konsep yang masih lemah ini menjadikan terjadinya penurunan kompetensi inti dari satu daerah terhadap daerah lainnya, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan sumberdaya daerah bersangkutan.

Kondisi ini salah satunya menyebabkan banyaknya proyek yang gagal di tahap implementasi karena sifatnya yang hanya melakukan replikasi daerah lainnya. Hal ini masih ditambah oleh adanya pendekatan yang bersifat *top down* dalam menentukan dan mengembangkan kompetensi inti daerah tanpa melakukan verifikasi ke daerah bersangkutan atau masyarakat.

Masalah Pembangunan industri. Peningkatan daya saing industri telah dilakukan dengan pendekatan kebijakan kluster industri. Pendekatan kluster industri ini didukung oleh diperkenalkannya konsep kompetensi inti yang seharusnya unik untuk setiap daerah.

Masalah Pembangunan industri terkait dengan kebijakan kluster industri adalah pada praktek kebijakan. Masalah-masalah tersebut dapat diringkas sebagai:

1. Penerapan konsep pembangunan industri dengan sistem kluster dengan mempertimbangkan kompetensi inti belum dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.
2. Pemahaman tentang kompetensi inti masih bersifat parsial. Pertimbangan karakteristik daerah dan penggunaan indikator belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan dan kebijakan industri di daerah
3. Penerapan konsep kompetensi inti masih belum banyak digali dari kondisi daerah. Dalam penerapan konsep masih terdapat penggunaan konsep kompetensi byang meniru dari daerah lain.

1.1. Tujuan dan Target

Tujuan kegiatan dirumuskan berdasarkan kondisi yang ada dan merujuk pada masalah dalam pembangunan industri. Masalah-masalah tersebut secara khusus difokuskan pada penerapan kebijakan industri kluster dengan menggunakan konsep kompetensi inti daerah.

Tabel 1. Tujuan dan Output Kegiatan

No	Tujuan	Keluaran atau Target
1.	Melakukan kajian kompetensi inti daerah	Terumuskan dan tersusunnya kompetensi inti bagi daerah-daerah kabupaten/kota.
2.	Menentukan kompetensi inti daerah dan menyusun konsep kompetensi inti daerah kabupaten/kota	
3.	Menyusun rencana implementasi kompetensi inti daerah	Tersusunnya rencana tindak pengembangan kompetensi inti daerah.

Tabel 2. Kesesuaian Ruang Lingkup Kegiatan dengan Tujuan dan Output Kegiatan

No.	Lingkup Kegiatan	Hasil Kegiatan (Keluaran)	Kesesuaian dengan tujuan dan output
1.	Analisis Kompetensi Inti dan konsep strategi kebijakan	Konsep dan teori tentang Kompetensi Inti	Menjawab tujuan (a) dan sebagai dasar teori bagi rumusan kompetensi inti sebagaimana output (a)
2.	Verifikasi dan konsolidasi perspektif, strategi dan kebijakan	Validitas teori dan strategi sesuai kondisi daerah	Dasar relevansi bagi tujuan (a) dan dasar yang relevan untuk output (a)
3.	Penentuan dan perumusan kompetensi inti	Rumusan Kompetensi Inti Daerah	Jawaban terhadap tujuan (b) dan sesuai output (a)
4.	Penyusunan Rencana Tindak pengembangan kompetensi Inti	Rencana Tindak Pengembangan Kompetensi Inti Setiap Daerah (13 kabupaten/kota)	Menjawab tujuan (c) dan sesuai dengan output (b)
5.	Diseminasi hasil rumusan pengembangan kompetensi inti	Validasi kompetensi inti dan Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kompetensi inti daerah	Realisasi output (b) bahwa pengembangan kompetensi inti harus bersifat konsultatif dan partisipatif, dan memberi dukungan bagi tujuan (c) tentang rencana implementasi yang valid

1.2. Keunggulan Berbasis Kompetensi

Perkembangan terbaru tentang paradigma perusahaan atau organisasi yang berbasis sumberdaya adalah adanya fokus pada suatu basis, sesuai yang melampaui *asset-tangible* dan *intangible*, tentang keunggulan berbasis sumberdaya, yaitu kompetensi. Dalam kerangka ini, perusahaan fokus pada kompetensi inti. Suatu kompetensi inti dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketrampilan dan teknologi yang terintegrasi. Suatu kompetensi perusahaan bukan suatu hal yang sama dengan ketrampilan individu personelnnya, tetapi merupakan integrasi dari ketrampilan-ketrampilan yang ada. Hal ini juga tidak sama dengan sumberdaya, sebab kompetensi lebih merupakan suatu asset. Perusahaan, jaringan distribusi, brand kesemuanya merupakan asset (dan sumberdaya), tetapi mereka bukan merupakan kompetensi inti. Namun demikian, suatu kemampuan khusus untuk mengelola perusahaan, jaringan distribusi, atau brand adalah kompetensi inti.

Suatu kompetensi dapat disebut kompetensi "INTI" hanya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang utama, syarat untuk kompetensi inti adalah keterbukaan terhadap pasar baru, kemungkinan-kemungkinan baru, sifat yang adaptif. Manager suatu perusahaan yang memiliki suatu kompetensi inti harus berpikir tentang bagaimana seperangkat ketrampilan yang terintegrasi diterapkan pada domain-domain produk baru. Oleh karena itu pandangan yang berbasis kompetensi berangkat dari fokus pada strategi level bisnis dan mulai menghadapi strategi level korporasi, dan menentukan jenis usaha

(bisnis) yang tepat.

Dalam studi ini perlu disepakati bahwa **KOMPETENSI INTI DAERAH** adalah:

- Adalah keunggulan daerah yang *Unik* meliputi aspek Keterampilan Manusia, Sumber Daya Alam, Lingkungan, Budaya, dan Prospek Pasar, baik untuk produk primer maupun produk olahan
- Kompetensi inti daerah dapat dibedakan atas kompetensi produk primer dan produk olahan. Produk primer meliputi aspek Manusia, Sumber Daya Alam, Lingkungan, Budaya, prospek Pasar. Produk olahan meliputi aspek Produk, Eko Wisata, Budaya, Teknologi, Infrastruktur, dan Pasar

Adapun ciri-ciri kompetensi inti daerah terdiri dari 3 yaitu:

- Memiliki akses potensial ke berbagai pasar – kompetensi inti daerah harus dapat mengembangkan produk atau jasa baru
- Kompetensi inti daerah harus menciptakan kontribusi nyata untuk mendapatkan **manfaat produk akhir**.
- Kompetensi inti daerah seharusnya memiliki sesuatu yang sulit ditiru oleh kompetitor lain/ daerah lain, dengan kata lain bersifat unik.

2 PROFIL KABUPATEN BANDUNG

2.1 Kondisi Umum dan Perekonomian

Saat ini Kabupaten Bandung terdiri dari 30 kecamatan dengan sebagian besar kecamatan memiliki kendala geografis, sosial dan psikologis. Dengan kondisi dan kendala yang dihadapi, pada tahun 2004 rata-rata IPM Kabupaten tercatat sebesar 68,52. IPM tertinggi pada Kecamatan Cileunyi 71,28 dan IPM terendah pada Kecamatan Rongga 60,80. Jika dibandingkan dengan target IPM yang ditentukan Propinsi Jawa Barat sebesar 69,8 maka kurang 1,28 untuk mencapai target.

Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 di Kabupaten Bandung semakin baik dibandingkan dengan tahun 2005. berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten adalah sekitar 5,62% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah sebesar 5,64%.

Kontribusi sektor ekonomi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah dari sektor industri pengolahan yang selama periode tahun 2004 – 2006 kontribusinya terus mengalami peningkatan dari 58,68 % pada tahun 2004 meningkat menjadi 59,01% pada tahun 2005 dan 59,39 % pada tahun 2006. Sedangkan kontribusi sektor pertanian kontribusinya pada tahun 2004 mencapai 9,26 % dan terus menurun pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing mencapai 9,24 dan 8,78.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2006 (juta rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006
1	Pertanian	1.936.204,42	2.040.223,70	2.046.450,09
	a. Tanaman bahan Makanan	1.319.688,58	1.391.707,07	1.367.731,46
	b. Perkebunan	279.545,63	295.784,55	310.162,91
	c. Peternakan	268.526,07	281.305,59	294.764,75
	d. Kehutanan	11.936,91	12.510,64	13.198,42
	e. Perikanan	56.507,23	58.915,85	60.592,53
2	Pertambangan Dan Penggalian	246.858,35	256.416,09	268.367,91
	a. Minyak dan Gas Bumi	186.088,28	192.363,38	200.176,06
	c. Penggalian	60.770,07	64.052,71	68.191,85
3	Industri Pengolahan	12.266.426,20	13.021.693,16	13.843.569,24
4	Listrik, Gas Dan Air Bersih	706.149,76	743.427,65	780.907,03
	Listrik	694.995,44	731.017,11	767.708,20
	Air Bersih	11.154,32	12.410,54	13.198,83
5	Bangunan /Kontruksi	424.878,92	440.574,19	466.344,23
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	3.433.578,85	3.599.906,30	3.822.693,35
	a. Perdagangan Besar & Eceran	2.736.833,36	2.875.746,13	3.041.286,73
	b. Hotel	15.900,06	16.759,35	18.097,90
	c. Restoran	680.845,43	707.400,82	763.308,72

No	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006
7	Pengangkutan dan Komunikasi	886.848,68	913.325,53	967.882,53
	a. Pengangkutan	849.448,35	872.862,59	924.185,84
	1. Angkutan Rel	7.364,31	8.173,69	8.798,95
	2. Angkutan Jalan Raya	748.128,38	765.316,67	811.707,93
	3. Jasa Penunjang Angkutan	93.955,66	99.372,23	103.683,96
	b. Komunikasi	37.400,33	40.462,94	43.696,69
	- Pos Dan Telekomunikasi	37.400,33	40.462,94	43.696,69
8	Keuangan, Persewaan & J. Perush.	522.862,88	549.793,71	574.331,09
	a. Bank	77.017,70	85.795,70	90.388,96
	b. Lembaga Keuangan Lainnya	18.438,66	19.333,89	19.797,63
	c. Sewa Bangunan	341.694,78	353.653,49	369.555,81
	d. Jasa Perusahaan	85.711,74	91.010,63	94.588,69
9	Jasa –jasa	663.494,81	691.432,56	737.514,28
	a. Pemerintahan Umum	71.480,34	75.352,93	79.792,93
	1. Adm. Pemerin. Dan Pertahan.	71.480,34	75.352,93	79.792,93
	b. Swasta	592.014,47	616.079,63	657.721,35
	1. Sosial Kemasyarakatan	124.620,70	130.000,12	142.982,90
	2. Hiburan dan Rekreasi	7.825,52	8.273,69	8.798,95
	3 Perorangan dan Rumah Tangga	459.568,25	477.805,82	505.939,50
	PDRB Dengan Migas	21.087.302,87	22.256.492,89	23.508.059,76
	PDRB Tanpa Migas	20.901.214,58	22.064.129,51	23.307.883,70

Sumber: BPS Kabupaten Bandung 2007

Dilihat dari pertumbuhan sektoral, pada tahun 2004 pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencapai angka 10,93%. Pada tahun 2005 sektor industri pengolahan yang tumbuh mencapai 6,15% dan pada tahun 2006 sektor jasa jasa yang tumbuh mencapai angka 6,66%.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2006 (juta rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006
1	Pertanian	6,79	5,37	0,31
	b. Tanaman bahan Makanan	7,53	5,46	-1,72
	b. Perkebunan	2,99	5,81	4,86
	c. Peternakan	7,53	4,76	4,78
	d. Kehutanan	5,72	4,81	5,50
	e. Perikanan	5,86	4,26	2,85
2	Pertambangan Dan Penggalian	5,28	3,87	4,66
	a. Minyak dan Gas Bumi	3,87	3,37	4,06
	b. Penggalian	9,83	5,40	4,64
3	Industri Pengolahan	5,36	6,15	6,31
4	Listrik, Gas Dan Air Bersih	5,48	5,28	5,04
	Listrik	5,42	5,18	5,02
	Air Bersih	9,16	11,26	6,35
5	Bangunan /Kontruksi	7,71	3,69	5,85
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	5,27	4,84	6,19
	a. Perdagangan Besar & Eceran	5,24	5,08	5,76
	b. Hotel	7,21	5,40	7,99
	c. Restoran	5,31	3,90	1,90

No	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,72	2,99	5,97
	a. Pengangkutan	5,54	2,76	5,88
	1. Angkutan Rel	7,92	10,99	7,65
	2. Angkutan Jalan Raya	5,41	2,30	6,06
	3. Jasa Penunjang Angkutan	6,44	5,77	4,34
	b. Komunikasi	9,96	8,19	7,99
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	10,93	5,15	4,46
	a. Bank	14,34	11,40	5,35
	b. Lembaga Keuangan Lainnya	5,59	4,86	2,40
	c. Sewa Bangunan	11,49	3,50	4,50
	d. Jasa Perusahaan	11,49	3,50	4,50
9	Jasa –jasa	7,05	6,18	3,93
	a. Pemerintahan Umum	4,85	4,21	6,66
	- Adm. Pemerin. Dan Pertahan.	2,27	5,42	5,89
	b. Swasta	5,17	4,06	6,76
	1. Sosial Kemasyarakatan	5,17	4,06	6,76
	2. Hiburan dan Rekreasi	6,37	4,32	9,99
	3 Perorangan dan Rumah Tangga	5,78	5,73	6,35
	PDRB Dengan Migas	5,65	5,54	5,62
	PDRB Tanpa Migas	5,67	5,56	5,64

Sumber: BPS Kabupaten Bandung 2007

2.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2006 mencapai 4,026,544 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,2 %. Angka harapan hidup Kabupaten Bandung mencapai angka 66,96 tahun. Gambaran tenaga kerja Kabupaten Bandung dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (IPAK) yang mencapai 52,84% dengan rasio ketergantungan 52,48%.

Visi Kabupaten Bandung adalah terwujudnya masyarakat kabupaten yang refeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Sementara misi Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi di atas yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Memantapkan keshalehan sosial berlandaskan iman dan takwa
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa

3

PROFIL IKM KABUPATEN BANDUNG

Industri kecil menengah yang paling menonjol di Kabupaten Bandung adalah Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan jumlah unit usaha 177 unit usaha dan penyerapan tenaga kerja paling besar yaitu 9,930 orang. Dengan nilai investasi Rp.75,85 Milyar, nilai produksi TPT Kabupaten Bandung per tahun mencapai Rp.47,975 milyar.

Tabel 5. Profil IKM Kabupaten Bandung

No	Industri	Nilai Produksi (Juta Rp/Th)	Nilai Investasi (juta Rp/Th)	Tenaga kerja (orang)	Jumlah Unit Usaha
1	Tekstil dan Produk Tekstil	47,975.19	75,850.11	9,930	177
2	Makanan dan Minuman	14,777.03	23,362.89	1,868	112
3	Suku Cadang Kendaraan	1,854.16	3,010.00	193	14
4	Alas Kaki	1,762.38	2,861.00	367	11
5	Kulit dan Barang dari Kulit	1,889.46	3,013.50	380	7
6	Meubeul	2,780.62	4,514.00	301	18
7	Kerajinan	704.17	1,085.00	96	3

Sumber: Subdin Perindustrian Kabupaten Bandung 2007

Industri makanan dan minuman merupakan IKM dengan unit usaha terbanyak kedua yaitu mencapai 112 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1,868 orang dan nilai produksi pertahun mencapai Rp 14,78 milyar. Industri lainnya yang berkembang di Kabupaten Bandung adalah industri suku cadang kendaraan bermotor, industri alas kaki, industri kulit dan barang dari kulit, industri meubeul dan kerajinan. Dari jumlah unit usaha ketujuh industri ini semuanya merupakan unit usaha yang terdapat di dinas perindustrian Kabupaten Bandung.

4

PENENTUAN & ANALISIS PRODUK UNGGULAN PRIORITAS (PUP)

Penentuan produk unggulan Kabupaten Bandung dilakukan melalui *Focused Group Discussion* (FGD) pada tanggal 26 November 2007. Sebelum dibawakan ke FGD terlebih dahulu dipersiapkan data sekunder sebagai data pendukung bagi narasumber yang terlibat dalam menetapkan Produk Unggulan Prioritas (PUP). Pihak yang terlibat sebagai narasumber dalam FGD terdiri dari wakil pengusaha, perguruan tinggi, forum komunikasi pengusaha, paguyuban pengusaha, Disperin, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Bappeda Kabupaten Bandung.

Dalam penentuan PUP, narasumber cukup berdebat dengan alot, karena ada 2 perbedaan pandangan. Salah satu pihak menginginkan produk makanan dan minuman sebagai komoditas unggulan prioritas. Di sisi lain, pihak lain menginginkan tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai PUP. Perbedaan tersebut muncul karena cara pandang yang berbeda mengenai produk unggulan prioritas. Keberpihakan terhadap industri makanan dan minuman disampaikan dengan argumen bahwa produk tersebut berkembang dengan berbasis pada sumber daya lokal. Dengan demikian manfaat ekonomi yang dirasakan lebih menyentuh masyarakat Kabupaten Bandung. Sementara produk TPT telah mempunyai citra yang kuat berkaitan dengan Kabupaten Bandung. Di samping itu, TPT banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah unit usaha ini terbanyak di Kabupaten Bandung dan sudah berorientasi ekspor.

Berdasarkan alat analisis Metode Bayes dihitung prioritas pembobotan Produk Unggulan Prioritas (PUP) Kabupaten Bandung. Berikut peringkat produk unggulan yang diperoleh untuk menetapkan PUP.

Tabel 6. Peringkat Produk Unggulan untuk Penentuan PUP

No	Alternatif Produk/Industri	Peringkat
1	Tekstil dan produk Tekstil	1
2	Kulit dan Barang dari kulit	2
3	Makanan dan Minuman	3
4	Alas Kaki	4
5	Meubeul	5
6	Kerajinan	6
7	Suku cadang kendaraan	7

5

IDENTIFIKASI DAFTAR KOMPETENSI & KOMPETENSI INTI TPT KABUPATEN BANDUNG

Kompetensi inti ditemukan dari kompetensi-kompetensi yang diidentifikasi terlebih dahulu. Kriteria pemilihannya adalah dengan mempertimbangkan keunikan, daya saing, keterbukaan terhadap pasar baru, dan manfaat yang lebih baik bagi pelanggan.

Tabel 7. Daftar Kompetensi Tekstil dan Produk Tekstil Kabupaten Bandung

Kompetensi	Deskripsi
1. Sentra produksi serta produsen sangat banyak	Sentra produksi IKM TPT Kabupaten Bandung berada hampir di setiap kecamatan. Dari 30 kecamatan (setelah pemekaran) yang ada di Kabupaten Bandung, sentra IKM-TPT tersebar di 25 kecamatan.
2. Tenaga kerja terampil lokal yang cukup banyak	IKM-TPT mempunyai karakteristik proses produksi padat tenaga kerja, sehingga dengan banyaknya jumlah IKM maka tenaga kerja yang terserappun relatif banyak.
3. Daya adopsi desain	Kemampuan meniru terutama pada aspek desain sangat baik. Dengan mudah diperolehnya informasi mengenai perkembangan desain baik dari majalah maupun dari media elektronik lainnya menyebabkan IKM-TPT berkembang dengan mengikuti trend mode.
4. Citra/ histori	Pengembangan TPT di Kabupaten Bandung dilakukan sejak sebelum PMA TPT masuk ke Kabupaten Bandung sehingga wilayah ini terkenal dengan penghasil utama produk TPT Nasional. Dengan berkembangnya industri besar TPT PMA, ada sebagian IKM TPT yang gulung tikar tahun 70-an. Selanjutnya industri besar berkembang terkonsentrasi pada penghasil benang dan kain yang menjadi pemasok utama bagi industri TPT Kabupaten Bandung, sehingga industri ini terus berkembang.
5. Kemudahan memperoleh bahan baku	Keberadaan industri besar penghasil benang dan kain memudahkan IKM-TPT mendapatkan bahan baku untuk produksinya.
6. Jaminan kuantitas dalam memenuhi permintaan pasar	Banyaknya jumlah unit usaha IKM-TPT di Kabupaten Bandung menjadikan Kabupaten Bandung sebagai penyumbang utama terhadap total produk TPT Jawa Barat. Produk TPT IKM dipasarkan baik di lokal kabupaten, nasional dan bahkan ekspor ke berbagai negara timur tengah, Afrika, dsb
7. Manajemen jaringan distribusi pemasaran	Pada saat ini IKM-TPT Kabupaten Bandung mempunyai banyak outlet di Pasar Tanah Abang Jakarta dan Bantar Gubuk Cirebon.

Memperhatikan banyak sentra industri TPT yang terdapat di Kabupaten Bandung, maka ditetapkan sentra produksi sangat banyak sebagai kompetensi inti industri TPT di Kabupaten Bandung. Berikut ini disajikan sebaran sentra produksi industri TPT di Kabupaten Bandung.

Tabel 8. Sentra Produksi IKM-TPT Kabupaten Bandung

No.	Sentra Produksi –IKM	Produk TPT-IKM
1.	Ibun	Baby set , lap pembersih
2.	Soreang	Pakaian Jadi
3.	Majalaya	ATBM Sarung
4.	Rancaekek	Kerudung, Kaset dari limbah tekstil
5.	Cicalengka	Kerudung
6.	Pameungpeuk	Peci/ kupiah
7.	Margahayu	Boneka dan Topi
8.	Margaasih	Jaket
9.	Baleendah	Busana Muslim
10.	Cileunyi	Kerudung.
11.	Katapang	pakaian jadi
12.	Cikancung	Kapas Kosmetik
13.	Ciparay	Kain gordin
14.	Cilengkrang	Tas kain
15.	Solokan Jeruk	Sarung
16.	Paseh	Pakaian Dalam
17.	Pasir jambu	Pakaian jadi
18.	Kutawaringin	Jeans, Pakaian jadi
19.	Bojong Soang	tas Sekolah
20.	Pacet	Gordin
21.	Dayeuh Kolot	pakaian jadi .
22.	Nagreg	kerudung dan Tas
23.	Banjaran	pakaian Jadi dan Tas
24.	Cangkuang	pakaian jadi(kaos) & Tas
25.	Cimaung	Tas & pakaian jadi

6

ANALISIS RANTAI NILAI, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI INTI

Di Kabupaten Bandung perkembangan industri TPT, dari sisi infrastruktur perusahaan terbentuk melalui usaha turun temurun, baik dari aspek manajemen, perencanaan maupun pengelolaan keuangan. Pengembangan IKM Kabupaten Bandung sendiri, yang saat ini berlangsung, lebih mengarah kepada pengembangan produk TPT. Sementara teknologi berkembang sejak digunakannya alat tenun bukan mesin (ATBM) sampai digunakan mesin tenun. Kondisi mesin produksi TPT sendiri sekarang sudah dinilai terlalu tua sehingga perlu program restrukturisasi mesin TPT yang tengah dijalankan oleh Disperindag Kabupaten Bandung melalui dana APBD. Untuk pengembangan TPT, di Kota Bandung telah ada pusat penelitian tekstil dan perguruan tinggi tekstil.

Terkait dengan pengadaan bahan baku dan pemasaran, gambaran kondisinya adalah sebagai berikut:

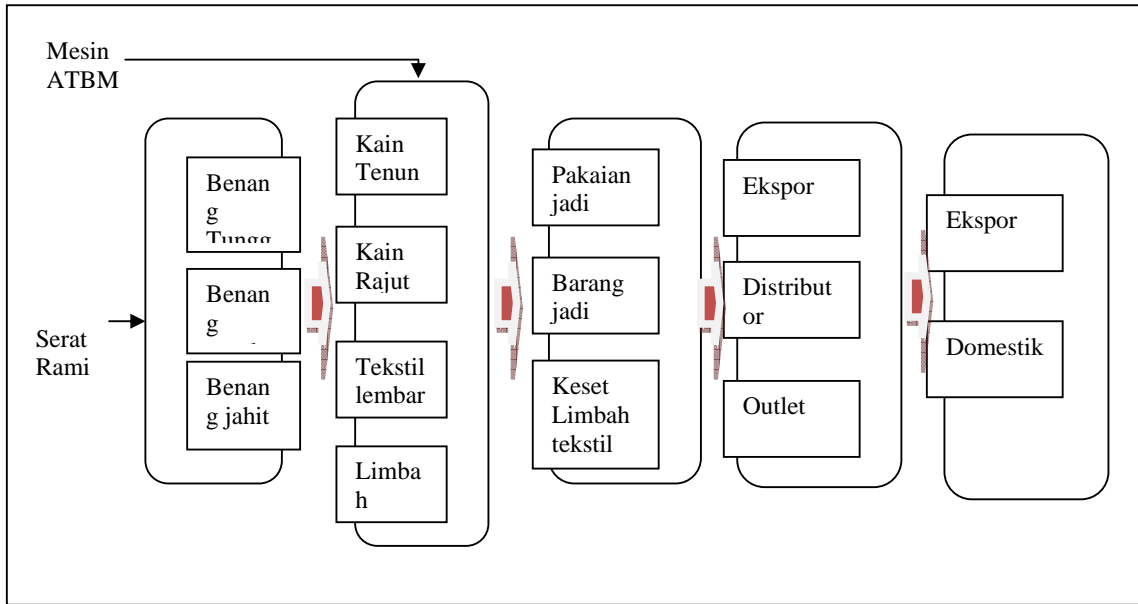
- Adanya usaha besar penghasil benang dan kain menjamin ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri TPT. Namun struktur pasar input yang monopsoni¹ sangat merugikan IKM TPT.
- Cara pembayaran bahan baku pada umumnya dilakukan dengan pembayaran cash, namun ada pula yang kredit 3 bulan.

Jaminan pasokan bahan baku dari industri besar sangat baik. Karena itu industri TPT jarang menyimpan bahan baku dalam jumlah banyak. Bahan baku yang disimpan di gudang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi selama satu minggu sampai dengan satu bulan.

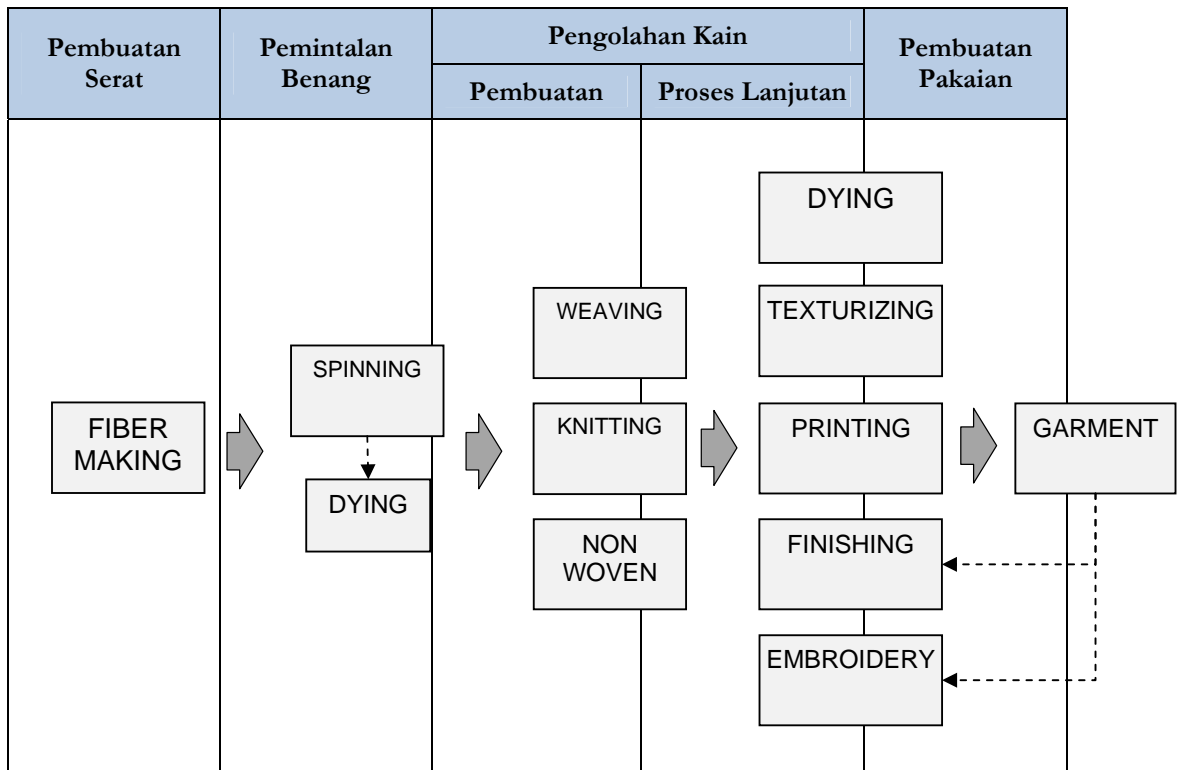
Karakteristik produksi TPT dilakukan dengan padat tenaga kerja. Meskipun telah menggunakan mesin produksi namun masih membutuhkan tenaga operator yang banyak. Kondisi mesin sendiri sekarang tengah membutuhkan upaya restrukturisasi mesin.

Distribusi produk dilakukan ke wilayah setempat, kabupaten, provinsi, domestik (nasional) maupun ekspor. Distribusi nasional dilakukan melalui penyediaan outlet di Jakarta dan Cirebon. Sedangkan distributor untuk ekspor masih dilakukan oleh pelaku ekspor dari Jakarta.

¹ **Monopsoni**, adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi



Gambar 1. Diagram Alir Produk TPT



Gambar 2. Diagram Alir Operasi Industri TPT

http://blog.aurino.com

7

ANALISIS RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN INDUSTRI TPT KABUPATEN BANDUNG

Jika dipetakan menurut analisis SWOT, maka kondisi industri TPT di Kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagaimana uraian berikut ini.

<p>STRENGTH (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Citra/Historis • Penyerapan Tenaga Kerja • Bahan baku dapat diperoleh • Daya Adopsi • Jaminan Kuantitas • Terdapat banyak sentra produksi • Jaringan Distribusi Pemasaran 	<p>WEAKNESS(W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal • Manajemen • Infrastruktur • Teknologi informasi • Akses ekspor langsung • Daya inovasi • Daya Saing • Design
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Ekspor dan lokal masih terbuka • Sentra pemasaran di setiap daerah Propinsi • Perluasan sentra industri • Kebijakan restrukturisasi mesin 	<p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluktuasi harga. • Ketergantungan Bahan baku import • Pasar bebas • Dampak lingkungan • Produk import • Monopoli penyediaan bahan baku

Kondisi TPT di Bandung pada umumnya memiliki beberapa masalah yang serupa sebagai berikut:

- Permesinan yang sudah tua/teknologi di industri tertinggal;
- Masuknya produk TPT illegal dari luar negeri;
- Munculnya pesaing baru, Pakistan, Vietnam, Bangladesh;
- Munculnya perjanjian dagang regional baru yang berdampak pada posisi tawar TPT nasional;
- Belum berkembangnya bahan baku serat alam;
- Belum cukup berkembangnya industri pendukung seperti asesoris, *interlining*, industri *spare-parts*, *supplies (bobbin, paper tubes, papercone, filter cloth)*);
- Belum berkembangnya industri kimia tekstil (*dyestuff, auxilliaris*);
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, terutama di bidang desain, marketing dan litbang; Masih terbatasnya pengembangan IKM tekstil, terutama dalam penanganan, pencemaran lingkungan, desain produk tradisional, akses pasar, dan manajemen mutu.

Berdasarkan pemetaan kondisi industri TPT di Kabupaten Bandung, sebagaimana

diuraikan di atas, maka disepakati rencana tindak Dan strategi pengembangan industri TPT berbasis kompetensi inti sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Rencana Tindak Pengembangan Industri TPT di Kabupaten Bandung

Jangka Waktu	Program	Rencana Kegiatan Teknis	Instansi Terlibat
Jangka Pendek	- Perencanaan pengembangan - Peningkatan Kualitas SDM	- Penyusunan Masterplan - Pendampingan Manajemen IKM	- PT - Pengusaha - Dinas terkait
	- Fasilitas Pembiayaan	- Modal usaha - Modal investasi	Dinas Terkait Bank
	- Kelembagaan	- Pemberdayaan IKM melalui paguyuban TPT - Pengembangan sentra pemasaran - Showroom IKM TPT	PT Pengusaha Dinas Terkait
	- Peningkatan Kemitraan	- Pameran - Temu/kontak bisnis - Pembelian bahan baku bersama	Dinas Terkait Pengusaha Paguyuban
Jangka Menengah	- Kelembagaan	- Pengembangan Asosiasi Bisnis TPT – IKM Kabupaten Bandung. - Pengembangan komisariat paguyuban	- Pengusaha - Paguyuban - Dinas terkait
	- Peningkatan pangsa Pasar Domestik	- Pengembangan jaringan pemasaran di berbagai daerah	- Dinas Terkait - Pengusaha - Paguyuban
	- Mesin Produksi	- Rekondisi mesin	- Dinas Terkait - Pengusaha - Bank - PT
	- Teknologi Informasi	- Pelatihan teknologi informasi e-commerce - Pengembangan Website TPT- IKM - Direktori IKM	- PT - Pengusaha - Paguyuban - Dinas Terkait
Jangka Panjang	Meningkatkan Jaringan Ekspor	- Studi Banding luar negeri - Partisipasi dalam Pameran Internasional	- Dinas terkait - Deperin - Pengusaha - Paguyuban

8 PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian kompetensi inti industri TPT di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Produk unggulan prioritas di Kabupaten Bandung adalah tekstil dan produk tekstil dengan kompetensi inti terletak pada jumlah sentra yang sangat banyak.
- b. Dalam rangka program pengembangan industri TPT Kabupaten Bandung, dirumuskan konsep pengembangan sumber daya manusia berupa program Pendidikan dan Latihan, dalam hal pendidikan formal, desain, manajemen dan teknik produksi.
- c. Rencana tindak yang dapat dikonsepskan adalah untuk menentukan standar kemampuan SDM, peningkatan *Building Capacity*, *Efficiency Internal* dan *Efficiency External*.
- d. Rencana tindak yang ditawarkan diharapkan mempunyai *multiplier effect* berupa manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri TPT.

8.2. Saran

- a. Disarankan agar rencana tindak ini dapat disosialisasikan kepada *stakeholder* industri TPT, agar mereka mempunyai persiapan dalam menjalankan tupoksinya.
- b. Senantiasa melakukan kajian lanjutan secara konsisten yang berfungsi sebagai Monitoring and Evaluation agar mendapatkan hasil yang optimal.